KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Novanto Bebas, Pansus Ogah Berhenti Korek-korek KPK
Tanggal : Selasa, 03 Oktober 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Novanto Bebas, Pansus Ogah Berhenti Korek-korek KPK

Pansus Hak Angket KPK tak mau terus dikait-kaitkan dengan kasus e-KTP. Makanya, saat Ketua DPR Setya Novanto menang praperadilan lawan KPK dalam kasus tersebut, Pansus memastikan tidak akan berhenti untuk ngorek-ngorek borok KPK.

KETUA Pansus Hak Angket Agun Gunandjar menyebut bahwa pembentukan Pansus semata-mata perintah Undang-Undang untuk mengawasi KPK. Keberadaan Pansus bukan untuk merecoki penanganan kasus e-KTP yang melilit Setya Novanto. Makanya, meski Novanto menang praperadilan, Pansus tidak akan berhenti.

"Bagaimana Pansus berhenti. Ini ada UUD dan UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang harus kami pertanggungjawabkan. Ini perintah hukum, perintah konstitusi. Tidak mungkin kami menghentikan sesuatu tanpa ada akhir," ucap politisi Golkar ini di Gedung DPR, kemarin.

Dia juga mengklaim, keberadaan Pansus bukan untuk mempreteli KPK. Pansus justru bertujuan untuk menguatkan KPK. Karena itu, dia berharap KPK bisa segera memenuhi undangan Pansus untuk rapat bareng di Senayan.

Jangan Biarkan KPK Kedodoran

Di tempat terpisah, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyebut bahwa nilai tambah eksistensi KPK patut dipersoalkan. Alasannya, keberadaan KPK selama ini belum bisa menurunkan tingkat kasus korupsi. Dalam fakta yang terjadi sekarang, korupsi justru bertambah marak dan terjadi pada hampir semua institusi negara dan daerah.

"Semakin tingginya intensitas korupsi juga menunjukkan efektivitas peran dan fungsi KPK semakin lemah. KPK kedodoran karena gagal membangun sistem pencegahan," ucapnya.

Kalau peran dan fungsi KPK efektif, lanjut Bambang, korupsi seharusnya menurun. Nyatanya, korupsi justru makin marak dan terjadi pada hampir semua lembaga seperti sekarang ini. "Itu sama artinya bahwa peran dan fungsi KPK masih jauh dari efektif."

Dengan fakta ini, kata Bambang, hendaknya menyadarkan semua pihak bahwa KPK harus diperkuat melalui beberapa opsi kebijakan, termasuk opsi melakukan pembenahan secara menyeluruh ke dalam. Untuk pembenahan itu, Pansus sudah memberi jalan. Pansus sudah mengungkap sejumlah masalah internal di KPK.

Kata Bambang, dengan temuan Pansus plus fakta semakin maraknya tindak pidana korupsi menjadi bukti bahwa KPK belum cukup ideal untuk melaksanakan fungsi atau kerja pencegahan korupsi. Dengan semua hal itu, dia berharap, semua pihak untuk tidak berpikir yang bukan-bukan terhadap Pansus dan DPR.

"Harus ada kemauan untuk mengakui bahwa KPK sesungguhnya sudah kedodoran dalam merespons tingginya intensitas korupsi di tubuh birokrasi pemerintah pusat maupun daerah. Pertanyaannnya kini, berapa lama lagi kita harus membiarkan KPK terus yang terus kedodoran itu dengan berbagai kekeliruannya dalam proses penegakan hukum pemberantasan korupsi. Kekalahan praperadilan kasus Setya Novanto untuk yang kesekian kalinya mengkonfirmasi ada cara-cara kerja yang kurang cermat," ucapnya.

Bambang mempersilakan KPK terus menghadirkan hasil penindakan atau operasi tangkap tangan (OTT). Hanya saja, perlu dilihat bahwa kinerja dari aspek penindakan itu tidak menurunkan niat oknum untuk mencari peluang melakukan korupsi. Buktinya, semakin banyak pejabat yang terkena OTT dengan modus yang terus berganti.

"Sudah terbukti bahwa besarnya jumlah penindakan maupun OTT kasus korupsi merupakan kegagalan KPK dalam membangun budaya dan kesadaran antikorupsi. Sebaliknya, banyaknya OTT masyarakat melihat dan mencatat bahwa tindak pidana korupsi justru semakin marak dari waktu ke waktu," tandasnya. ■ KAL